

**PENGARUH PENGAWASAN PREVENTIF DAN PENGAWASAN DETEKTIF
TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN ANGGARAN
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bukittinggi)**

ARTIKEL SKRIPSI



OLEH :

ARIF FUADI

02144/2008

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ENGARUH PENGAWASAN PREVENTIF DAN PENGAWASAN DETEKTIF TERHADAP
EFEKTIFITAS PENGENDALIAN ANGGARAN**
(Studi Empiris SKPD Kota Bukittinggi)

Oleh :
ARIF FUADI
02144/2008

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode Maret 2013
dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, Februari 2013

Pembimbing I



Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak
NIP : 19580519 199001 1 001

Pembimbing II



Deviani, SE, M.Si, Ak
NIP : 19690610 199802 2 001

**Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas
Pengendalian Anggaran**
(Studi Empiris pada SKPD di Kota Bukittinggi)

Arif Fuadi

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : arif_fuadi@yahoo.co.id

Abstrak

Pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2011 kota Bukittinggi tingkat realisasi anggaran rata-rata SKPD yang ada di kota Bukittinggi berkisar pada 80 %. Tapi masih terdapat tingkat realisasi anggaran di SKPD yang masih rendah. Hal itu disebabkan kurangnya pengawasan dari pihak pemegang kebijakan baik itu dari eksekutif atau pun legislatif dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga pengendalian anggaran tidak efektif. Pengawasan merupakan bagian dari pengendalian, adanya kelemahan pada pengawasan akan menghasilkan pelaksanaan dari realisasi anggaran tidak optimal. Salah satu bagian dari pengawasan adalah pengawasan preventif dan pengawasan detektif. Penulis ingin mengetahui pengaruh pengawasan preventif dan pengawasan detektif tersebut terhadap efektifitas pengendalian anggaran pemerintah daerah. Untuk menguji hipotesis, penulis menggunakan data primer. Teknik analisis data analisis regresi berganda. Setelah data di analisis, ditemukan bahwa pengawasan preventif dan pengawasan detektif berpengaruh signifikan positif terhadap efektifitas pengendalian anggaran pada skpd. Artinya, jika pengawasan preventif dan pengawasan detektif semakin baik maka efektifitas pengendalian anggaran pemerintah akan semakin baik pula. Untuk itu disarankan kepada pemerintah daerah meningkatkan pengawasan preventif dan pengawasan detektif dalam pengendalian anggaran pemerintah daerah.

Kata kunci: pengawasan preventif, pengawasan detektif, pengawasan keuangan daerah, efektifitas pengendalian anggaran.

Abstract

Padang as the capitalcity of West Sumatra, based on the results of the Local Government Financial Reports Fiscal Year 2008 to 2010 received opinions Wajar Dengan Pengecualian. The results of this examination caused by Government Financial Statements did not complete the value of characteristics information from the financial statements it self. The value of local government financial reporting information is influenced by several factors: the capacity of human resources, the utilization of information technology, the control of regional finance and the system of internal control. The writer wanted to know the effect those factors to the value of local government financial reporting information. To test this hypothesis, the writer used primary data. The techniques analysis of data used path analysis with the capacity of human resources, the utilization of information technology and the control of regional finance as exogenous variable and the system of internal control as an intervening variable. After the data was analyzed, it found that all of the factors have a significantly give positive influence to the value of local government financial reporting information. It means, if the capacity of human resources, the utilization of the information technology, the control of regional finance and the system of internal control better than before, the information and financial report which produced by the

government will be better also. It is recommended to the local government to do a review about the capacity of human resources, the utilization of information technology, the control of regional finance and the system of internal control to make financial reporting so it has information value.

Key words: *information value, the capacity of human resources, the utilization of information technology, the control of regional finance, the system of internal control.*

1. Pendahuluan

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, memegang peranan penting untuk membina serta mengawasi jalannya anggaran dengan membentuk peraturan perundang-undangan dan menyiapkan aparat yang kompeten. Untuk menyiapkan aparat pengawasan yang kompeten maka pemerintah melakukan pembinaan. Pembinaan dilakukan dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi, dan evaluasi di bidang pengelolaan keuangan daerah terhadap aparat yang menjalankan dan yang mengawasi jalannya anggaran (PP Nomor 20 Tahun 2001).

Pengawas pelaksanaan anggaran diawasi oleh satuan unit pelaksanaan anggaran, baik saat realisasi anggaran dan setelah realisasi anggaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan (Permendagri Nomor 71 tahun 2010).

Anggaran pada prinsipnya digunakan sebagai pedoman kerja, pengkoordinasian kerja, dan pengawasan kerja (Munandar, 2001:10). Anggaran semestinya direalisasikan kepada masyarakat agar perekonomian masyarakat bergerak sehingga tercipta pembangunan yang sesuai sasaran.

Pengendalian berperan sebagai suatu pedoman untuk membantu segala kegiatan

agar berjalan sebagaimana mestinya (Porter, 1992 dalam Fajri, 2009). Jadi, pengendalian terhadap anggaran adalah proses untuk memastikan bahwa anggaran sampai hal yang spesifik dilaksanakan secara tepat dan efisien. Pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan dengan tujuan menjamin agar pengumpulan penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran negara (Revrison, 2000:118). Mardiasmo (2004:134) mengatakan bahwa efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jadi, efektifitas pengendalian anggaran adalah berhasil atau tidaknya tujuan dari pengendalian terhadap anggaran tersebut dilaksanakan. Efektifitas pengendalian terhadap anggaran akan meminimalisir penyimpangan dan kebocoran anggaran.

Revrison (2000:123) menjelaskan bahwa pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya suatu kegiatan. Pengawasan preventif pada dasarnya dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan. Revrison (2000: 123) menjelaskan bahwa pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan. Pengawasan ini biasanya dilakukan setelah dilakukan tindakan/kegiatan, yaitu dengan membandingkan antara yang telah terjadi dengan yang seharusnya terjadi. Selain itu peng-

awasan detektif juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan dan biayanya telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Porter (1992) dalam Fajri (2009) mengatakan tipe pengawasan preventif sangat diperlukan karena dapat menghentikan timbulnya permasalahan. Para perancang sistem harus menekankan pengendalian mereka pada pengawasan preventif. Merupakan hal yang lebih ekonomis dan lebih baik bagi hubungan antar manusia untuk mencegah suatu permasalahan sebelum timbul daripada mendeteksi dan mengoreksi permasalahan setelah terjadi.

Pengawasan merupakan bagian dari pengendalian, adanya kelemahan pada pengawasan akan menghasilkan pelaksanaan dari realisasi anggaran tidak optimal. Pengawasan bertujuan untuk menjaga agar rencana itu dalam realisasinya tetap terarah pada tujuan yang telah ditentukan dan sesuai dengan peraturan (Widjaja, 2002 : 94).

Revrisond (2000:118) membagi pengawasan menurut sifatnya menjadi pengawasan preventif dan pengawasan detektif. Setelah pengawasan preventif dilaksanakan, maka nantinya aparat yang ditugaskan untuk mengawasi anggaran akan melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa anggaran telah dijalankan sebagaimana mestinya dan mengidentifikasi kesalahan yang mungkin terjadi, ini disebut dengan pengawasan detektif.

Revrisond (2000:123) mengatakan pengawasan detektif adalah bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban, yang biasanya dilaksanakan setelah dilakukan suatu kegiatan. Selanjutnya Revrisond (2000:118) mengatakan bahwa pengawasan sesungguhnya mencakup aspek pengendalian dan pemeriksaan yang dilakukan pihak atasan terhadap bawahan. Jadi, pengawasan detektif merupakan salah satu aspek yang mendukung

untuk terlaksananya pengendalian yang efektif.

Pengawasan ini menurut teori dilakukan dengan memeriksa seluruh dokumen yang ada, dan tentu saja hal itu dilakukan setelah anggaran dipakai, dan digunakan, yang mana pengawasan ini bertujuan memeriksa apakah penggunaan anggaran telah digunakan dengan efektif dan sesuai dengan ketetapan. Semakin bagus pengawasan detektif maka semakin baik pula pengendalian anggarannya. Jadi pengawasan detektif berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

Tingkat realisasi anggaran dari setiap SKPD dinilai masih banyak yang tidak mencapai target. Data tingkat pencapaian realisasi anggaran dapat kita peroleh dari informasi yang dipublikasikan pada media masa. Pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2011 kota Bukittinggi tingkat realisasi anggaran rata-rata SKPD yang ada di kota Bukittinggi berkisar pada 80 %. Hal itu disebabkan kurangnya pengawasan dari pihak pemegang kebijakan baik itu dari eksekutif atau pun legislatif dalam pengelolaan keuangan daerah (Laporan Realisasi Anggaran tahun 2011).

Porter (1992) dalam Fajri (2009) mengatakan pengawasan preventif meliputi standar, desain formulir, formulir-formulir yang dinomori (dinomori terlebih dahulu secara tercetak), dokumentasi, kata-kata sandi, konsistensi operasi. Penganggaran berbasis kinerja merupakan bagian dari standar dan berarti termasuk pengawasan preventif. Hindri (2006) telah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh penganggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian yang meliputi efektivitas pengendalian keuangan dan efektivitas pengendalian kinerja pada pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung adanya hubungan kausalitas antara pengawasan preventif dengan efektivitas pengendalian keuangan daerah

Pada penelitian tersebut, yang menjadi objek penelitian adalah eselon dua sampai eselon tiga pada Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten. Sebagaimana yang diketahui, pejabat dinas pemerintahan daerah sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah juga mempunyai fungsi sebagai pengawas terhadap jalannya pelaksanaan anggaran pemerintahan daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pelaksana keuangan daerah dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Melihat fenomena yang terjadi di Kota Bukittinggi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih menyeluruh di kota Bukittinggi.

2. Telaah Literatur dan Perumusan Hipotesis

Efektivitas Pengendalian Anggaran

Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008).

Pengendalian terhadap anggaran adalah proses untuk memastikan bahwa anggaran sampai hal yang spesifik dilaksanakan secara tepat dan efisien. Pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan dengan tujuan menjamin agar pengumpulan penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara,

tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran negara (Revrison, 2000:118).

Munandar (2001:1) mengatakan yang dimaksud anggaran ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Rencana adalah suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktifitas atau kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Jadi anggaran juga merupakan suatu rencana, karena anggaran merupakan penentuan terlebih dahulu tentang kegiatan-kegiatan di waktu yang akan datang.

Indra (2006:164) diketahui bahwa anggaran juga memiliki fungsi sebagai:

- a. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.
- b. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan.
- c. Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan.
- d. Anggaran sebagai alat pengendali unit kerja.
- e. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam mencapai visi organisasi.
- f. Anggaran merupakan instrumen politik.
- g. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

Revrison (2000:118) menjelaskan bahwa pengendalian keuangan negara adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah digariskan. Karena yang menjadi objek pengendalian keuangan negara terutama adalah anggaran negara, maka pengendalian keuangan negara dari segi anggaran dapat pula dinyatakan sebagai segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan-penerimaan negara,

dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran. Indra (2006:180) mengatakan faktor penentu efektifitas suatu anggaran dilihat dari segi anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Teknik perhitungan perkiraan pendapatan dan pengeluaran
- b. Fleksibilitas dalam fiskal
- c. Tingkat pengeluaran yang diharapkan
- d. Fasilitas dalam pemberlakuan tingkat pajak
- e. Batasan proses anggaran
- f. Waktu dan informasi
- g. Manajemen keuangan
- h. Waktu yang salah dalam melepaskan dana
- i. Biaya yang terlalu besar
- j. Kurangnya fleksibilitas dalam menggunakan dana
- k. Hambatan sumber daya manusia.

Efektivitas pengendalian merupakan tujuan yang ingin dicapai dari fungsi anggaran sebagai alat pengendalian (Kenis, 1979 dalam Mardiasmo, 2004). Mardiasmo (2004:134) mengatakan bahwa efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jadi, efektifitas pengendalian anggaran adalah berhasil atau tidaknya tujuan dari pengendalian terhadap anggaran tersebut dilaksanakan

Pendlebury (2000) menjelaskan pengendalian anggaran berhubungan dengan upaya yang dilakukan agar pengeluaran aktual sejalan dengan jumlah yang dianggarkan dan bahwa tujuan dan tingkat aktivitas yang dicantumkan dalam anggaran tercapai. Salah satu upaya tersebut adalah pengawasan.

Zulkifli (2003:64) mengatakan pengawasan adalah kegiatan manajemen yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk menentukan apakah pelaksanaannya sudah dikerjakan sesuai dengan perencanaan dan melakukan koreksi bagi pelaksanaan yang belum terealisasi.

Pengawasan

Pengertian pengawasan menurut Sarwoto (1968:93) dalam Shinta (2000) adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan hasil yang dikehendaki. Dalam pengertian pengawasan terlihat tujuan dari pengawasan yaitu mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana.

Pengawas dilakukan dalam melakukan suatu pekerjaan tentunya memiliki tujuan tertentu, menurut Wardoyo (1986:136) dalam Shinta (2000), tujuan pengawasan:

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu atau yang dilaksanakan sesuai dengan instruksi dan azas yang telah ditetapkan.
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan secara efektif dan efisien.
- c. Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana semula.
- d. Untuk mencari jalan keluar apabila ternyata ada ditemui kesulitan dan kegagalan kearah perbaikan.

Keputusan Menteri Keuangan no 152 tahun 2011 menjelaskan bahwa pengawasan menurut sifatnya dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Pengawasan Preventif
Pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan, atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan negara.
- b. Pengawasan detektif.
Pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban, biasanya dilakukan setelah dilakukannya kegiatan.

Perbedaan antara pelaksanaan dengan rencana selalu ada karena keterbatasan kemampuan para penyelenggara kegiatan operasional dan penampilan perilaku penyelenggara yang disfungsi dapat diketahui dengan berbagi teknik. Menurut Kamar (2004: 87) dalam Salman (2001), metode dan teknik pengawasan antara lain:

- a. Observasi langsung.
Metode ini dilakukan dengan melihat, mendengar dan mengalami hal-hal yang diawasi.
- b. Metode statistik
Metode ini dilakukan jika banyak terdapat segi teknis yang terjadi.
- c. Metode secara lisan dan tulisan
Menurut Handoko (1995:376) metode pengawasan ada 2 macam:
 - 1) Metode non kuantitatif.
Metode kuantitatif yaitu metode pengawasan keseluruhan (overall) terhadap kinerja (*performance*) organisasi dan sebagian biasanya mengawasi sikap dan kinerja (*performance*) para karyawan.
 - 2) Metode kuantitatif
Metode ini menyangkut penggunaan anggaran atau biaya organisasi.
Selanjutnya Winardi (1983:381) mengemukakan langkah-langkah dalam melakukan pengawasan adalah:
 - a. Mengukur hasil kerja
 - b. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dalam menafsirkan perbedaan-perbedaan.
 - c. Mengkoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan koreksi.

Pengawasan Preventif

Porter (1992:177) mengatakan tipe pengawasan preventif sangat diperlukan karena dapat menghentikan timbulnya permasalahan. Para pendesain sistem harus menekankan pengendalian mereka pada *pengawasan preventif*. Adalah lebih ekonomis dan lebih baik bagi hubungan antara manusia untuk mencegah suatu permasalahan sebelum timbul dari pada mendeteksi dan mengkoreksi permasalahan setelah terjadi. Pengawasan preventif meliputi standar, desain formulir, formulir-formulir yang dinomori (dinomori terlebih dahulu secara tercetak), dokumentasi, kata-kata sandi, konsistensi operasi.

Menurut Sopanah (2003) pengawasan dapat dilakukan berupa pengawasan langsung maupun tidak langsung serta preventif dan represif. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan serta meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan preventif dilakukan melalui preaudit yaitu sebelum pekerjaan dimulai.

Menurut Refrisond (2000:120), pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan, atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan negara. Pengawasan preventif pada dasarnya dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Widjaja (2002: 95) mengatakan pengawasan preventif pada umumnya tidak dilakukan oleh unit-unit pengawasan yang telah ditetapkan. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus di tempuh dalam melaksanakan kegiatan.

Menurut Refrisond (2000:123), tujuan pengawasan preventif secara terinci adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan.
- b. Memberi pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.
- c. Menentukan sasaran dan tujuan yang akan dicapai.
- d. Menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.

Tujuan pengawasan preventif terutama untuk mencegah terjadinya penyimpangan pada pelaksanaan anggaran.

Pengawasan Detektif

Porter (1992:177) mengatakan bahwa pengawasan detektif menyiapkan individu yang terlibat dalam suatu proses sedemikian rupa sehingga mereka selalu waspada akan timbulnya suatu permasalahan. Pengawasan detektif harus menunjukkan kemungkinan permasalahan yang harus diperhatikan individu-individu sehingga tindakan dapat dilakukan. Salah satu contoh pengawasan detektif adalah suatu daftar dari cek pembayaran dari mereka yang bekerja. Pengawasan detektif tidak akan mencegah permasalahan sebelum timbul, tetapi cenderung menunjukkan suatu permasalahan bila permasalahan itu timbul.

Menurut Revrisond (2000:123), pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan. Pengawasan detektif biasanya dilakukan setelah dilakukannya kegiatan, yaitu dengan membandingkan antara hal yang terjadi dengan hal yang seharusnya terjadi. Pengawasan detektif dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah ditentukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan caranya, pengawasan detektif dibedakan atas dua bagian, yaitu: pengawasan dari jauh dan pengawasan dari dekat.

Sebagaimana yang dikemukakan Revrisond (2000:123) pengawasan detektif ada dua, yaitu dari dekat dan dari jauh. Bukhori (1992) dalam Revrisond (2000:123) mengatakan pengawasan dari jauh adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara menguji dan meneliti laporan pertanggungjawaban bendaharawan beserta bukti-bukti pendukungnya. Pengawasan jenis ini cenderung bersifat pasif, karena pengawasan tidak berhubungan secara langsung dengan objek yang diperiksa. Pengawasan ini juga memiliki kelemahan yang mendasar. Bukti-bukti yang diperiksa seringkali hanya diperhatikan aspek formalnya, sedangkan

aspek materialnya yaitu mengenai akurasi bukti itu yang dibandingkan dengan barang yang telah dibeli atau kegiatan yang telah dibiayai, cenderung terabaikan.

Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan dari dekat adalah pengawasan yang dilakukan di tempat berlangsungnya pekerjaan atau di tempat diselenggarakannya kegiatan administrasi. Pemeriksaan dalam hal ini tidak hanya dilakukan terhadap bukti-bukti penerimaan atau bukti pengeluaran, tetapi dilanjutkan terhadap akurasi bukti-bukti tersebut secara material. Kelemahan utama dari pengawasan ini adalah kemungkinan kolusi antara aparat pengawasan dengan pihak yang sedang diawasi. Hal ini dimungkinkan karena sebelum melaksanakan tugas, biasanya petugas pemeriksa terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mengenai waktu pengawasan, kepada instansi yang akan diperiksanya. Sehingga instansi yang akan diperiksa dapat menyiapkan diri terlebih dahulu dengan menertibkan administrasi keuangannya.

Hubungan Antara Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran.

a. Hubungan antara Pengawasan Preventif dan Efektifitas Pengendalian Anggaran

Mardiasmo (2004:134) mengatakan bahwa efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jadi, efektifitas pengendalian anggaran adalah berhasil atau tidaknya tujuan dari pengendalian terhadap anggaran tersebut dilaksanakan.

Dari penjelasan di atas maka hubungan antara pengawasan preventif dengan efektifitas anggaran saling mengikat, pengawasan detektif menurut teori merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan berlansung, dan pengawasan ini dapat dijadikan sebagai pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyim-

pangan terhadap anggaran, dan mencegah tidak tercapainya anggaran sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Sehingga anggaran yang telah ditetapkan dapat diawasi penggunaannya sesuai dengan perhitungannya, dan tidak terjadi lagi dana-dana yang terbuang, dan tidak terserap secara penuh. Jadi pengawasan preventif sangat berhubungan signifikan terhadap efektifnya suatu anggaran. Semakin bagus pengawasan preventif yang dilakukan maka semakin bagus pula pengendalian anggaran tersebut, jadi pengawasan preventif berpengaruh positif terhadap pengendalian anggaran.

2. Hubungan antara Pengawasan Detektif dan Efektifitas Pengendalian

Revrisond (2000:118) membagi pengawasan menurut sifatnya menjadi pengawasan preventif dan pengawasan detektif. Setelah pengawasan preventif dilaksanakan, maka nantinya aparat yang ditugaskan untuk mengawasi anggaran akan melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa anggaran telah dijalankan sebagaimana mestinya dan mengidentifikasi kesalahan yang mungkin terjadi, ini disebut dengan pengawasan detektif.

Revrisond (2000:123) mengatakan pengawasan detektif adalah bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban, yang biasanya dilaksanakan setelah dilakukan suatu kegiatan. Selanjutnya Revrisond (2000:118) mengatakan bahwa pengawasan sesungguhnya mencakup aspek pengendalian dan pemeriksaan yang dilakukan pihak atasan terhadap bawahan. Jadi, pengawasan detektif merupakan salah satu aspek yang mendukung untuk terlaksananya pengendalian yang efektif.

Kerangka Konseptual

Efektifitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Bila anggaran berhasil mencapai

tujuannya, maka anggaran tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, tapi efektifitas hanya melihat apakah suatu program telah mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dalam mencapai efektifitas dalam pelaksanaan anggaran maka tentu ada prosedur sistem dari pengendalian yang dilakukan, proses dari suatu pengendalian itu disebut dengan pengawasan. Pengawasan menurut berdasarkan sifatnya terbagi dalam pengawasan preventif (sebelum terjadinya suatu kegiatan) dan pengawasan detektif (sesudah terjadinya kegiatan dengan, mengevaluasi dokumen-dokumen dan laporan pertanggungjawaban yang ada).

Gambar 1

Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan kajian teori di atas, maka rumusan hipotesis penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- H1: Pengawasan preventif berpengaruh signifikan positif terhadap efektifitas pengendalian anggaran
- H2: Pengawasan detektif berpengaruh signifikan positif terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini tergolong pada penelitian kausatif.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Bukittinggi berjumlah 32 SKPD yang terdiri dari Dinas, Badan, Kan-

tor, Kecamatan, dan Inspektorat. Penelitian ini menggunakan *total sampling* dikarenakan populasinya kurang dari 100 objek.

Responden dalam penelitian ini adalah kepala dinas, kepala tata usaha/sekretaris, staf bagian keuangan, bendaharawan pada SKPD jumlah responden 99 Responden.

Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada populasi dalam penelitian ini.

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel antara lain:

1. Variabel bebas di sini adalah pengawasan preventif (X1) dan pengawasan detektif (X2).
2. Variabel dependen disini adalah efektifitas pengendalian anggaran.

Pengukuran Variabel dan Instrumen Penelitian

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disusun sendiri.

Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan instrumen dalam mengukur apa yang hendak diukur. Sebelum kuesioner dibagikan kepada responden, terlebih dahulu dilakukan uji pendahuluan terhadap kuesioner. Untuk uji validitas, maka digunakan rumus korelasi *Product Moment*, sebagai berikut:

$r_{xy} =$

$$\frac{N(\sum XY) - (\sum Y)(\sum X)}{\sqrt{N \sum X^2 - (\sum X)^2} \sqrt{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien Korelasi

n = Besar sampel

x = Variabel Bebas (X_1, X_2)

y = Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Padang

Dari *print out* SPSS versi 16.0 dapat dilihat dari *Corrected Item-Total Correlation*. Jika nilai $r_{hitung} <$ dari r_{tabel} , maka nomor item tersebut tidak valid, sebaliknya jika nilai $r_{hitung} >$ dari r_{tabel} maka item tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Bagi item yang tidak valid, maka item yang memiliki nilai r_{hitung} yang paling kecil dikeluarkan dari analisis, kemudian dilakukan analisis yang sama sampai semua item dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan pengujian validitas, selanjutnya akan dilakukan pengujian reliabilitas, yang tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih. Instrumen dikatakan reliabel (andal) jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk uji reliabilitas digunakan rumus *Cronbach's Alpha*.

$$r = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[\frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma^2 t} \right]$$

Dimana:

r = Reliabilitas Instrumen

k = Banyak butir pertanyaan

$\sum \sigma_b^2$ = Jumlah varians butir

$\sigma^2 t$ = Varian total

Cara untuk mengukur reliabilitas dengan *Cronbach's Alpha* menurut Sekaran (2003:205) dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Kurang dari 0,6 tidak reliabel
- b. 0,6 – 0,7 akseptabel
- c. 0,7 – 0,8 baik
- d. Lebih dari 0,8 reliabel

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas untuk mengetahui metode statistik yang akan digunakan. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas residual dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov test* dengan taraf signifikan 5%. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Jika nilai Sig $\geq 0,05$ maka dikatakan berdistribusi normal.
- b. Jika nilai Sig $< 0,05$ maka dikatakan berdistribusi tidak normal.

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas antara satu dengan yang lain, maka salah satu variabel bebas tersebut dieliminir. Untuk menguji adanya multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflating Factor*) kecil dari 10 dan *tolerance* besar dari 0,10.

3. Uji Heterokedastisitas

Untuk menguji apakah dalam sebuah metode regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu pengamatan lain. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dapat menggunakan uji Gletser. Dalam uji ini, apabila hasilnya sig besar dari pada 0,05 maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas, model yang baik adalah tidak terjadi heterodastisitas.

Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif
 - a. Verifikasi Data

Verifikasi data yaitu memeriksa kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk memastikan apakah semua pertanyaan sudah dijawab lengkap oleh responden.

b. Menghitung Nilai Jawaban

- 1) Menghitung frekuensi dari jawaban yang diberikan responden atas setiap item pertanyaan yang diajukan
- 2) Mengitung rata-rata skor total item dengan menggunakan rumus:
$$\frac{5SS+4S+3R+2TS+1STS}{15}$$
Dimana:
SS = Sangat Setuju
S = Setuju
R = Ragu-ragu
TS = Tidak Setuju
STS = Sangat Tidak Setuju
- 3) Menghitung nilai rerata jawaban responden.

$$\text{Mean} = \frac{\sum_{h=1}^n x_i}{n}$$

Keterangan :

Xi = Skor total

N = Jumlah responden

- 4) Menghitung nilai TCR masing-masing kategori jawaban dari deskriptif variabel.

Dengan rumus:

$$\text{TCR} =$$

$$\frac{R_s}{n} \times 100$$

Keterangan :

TCR= Tingkat capaian responden

R_s = Rata-rata skor jawaban

n = Nilai skor jawaban

Nilai persentase dimasukkan ke dalam kriteria sebagai berikut:

- (a) Interval jawaban responden 76-100% kategori jawabannya baik

- (b) Interval jawaban responden 56-75% kategori jawabannya cukup baik
- (c) Interval jawaban responden <56% kategori jawabannya kurang baik

2. Metode Analisis

a. Uji F (F-test)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak. Rumus yang digunakan adalah:

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Keterangan :

F = uji F

R² = koefisien determinan

k = jumlah variabel bebas

n = jumlah sample

- 1) jika $F^{hitung} > F^{tabel}$, maka hipotesis diterima
- 2) jika $F^{hitung} < F^{tabel}$, maka hipotesis ditolak

b. *Adjusted R Square*

Untuk mengetahui kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat dilihat dari *Adjusted R Square*-nya, sedangkan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan model regresi berganda dikarenakan lebih dari satu variabel bebas dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Efektifitas Pengendalian Anggaran Pemerintah

a = Konstanta

$b_{1,2}$ = Koefisien regresi dari variabel independen

X_1 = Pengawasan Preventif

X_2 = Pengawasan detektif

e = Epsilon (variabel-variabel independen lain yang tidak diukur dalam penelitian yang mempunyai pengaruh terhadap variabel lain)

c. Uji Hipotesis Uji T(T-test)

Uji t dilakukan untuk menguji apakah secara terpisah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik, dengan rumus :

$$T = \frac{\beta n}{s \beta n}$$

Keterangan :

T = nilai mutlak pengujian

βn = koefisien regresi masing-masing variabel

$S \beta n$ = standar error masing-masing variabel

jika $t^{hitung} > t^{tabel}$, maka hipotesis diterima

jika $t^{hitung} < t^{tabel}$, maka hipotesis ditolak

Definisi Operasional

1. Efektifitas pengendalian anggaran.

Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jadi, pengendalian anggaran yang efektif adalah yang dapat mencapai tujuan dari pengendalian anggaran tersebut. Pengendalian anggaran berhubungan dengan upaya yang dilakukan agar pengeluaran aktual sejalan dengan jumlah yang dianggarkan dan bahwa tujuan dan tingkat aktivitas yang dicantumkan dalam anggaran tercapai. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala likert 5 alternatif jawaban.

2. Pengawasan Preventif.

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya

pelaksanaan suatu kegiatan, atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan negara. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam melaksanakan kegiatan. Prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam kegiatan pemerintahan terdapat dalam peraturan pemerintah tentang sistem pengendalian internal. Pengawasan Preventif dilakukan oleh Atasan pada SKPD, yaitu kepala kantor dan kepala dinas. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala likert 5 alternatif jawaban.

3. Pengawasan Detektif.

Pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggung-jawaban bendaharawan. Pengawasan detektif biasanya dilakukan setelah kegiatan, yaitu dengan membandingkan antara hal yang terjadi dengan hal yang seharusnya terjadi, serta untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah ditentukan itu telah sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala likert 5 alternatif jawaban.

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Jumlah sampel pada penelitian ini adalah tiga puluh dua SKPD di Kota Bukittinggi. Dari tiga puluh dua sampel tersebut atau 128 responden, jumlah responden mengembalikan kuesioner adalah 99 responden dan semuanya mengisi dengan lengkap. Dengan demikian kuesioner yang dapat diolah adalah seratus tiga puluh enam kuesioner. Gambaran penyebaran dan pengembalian kuesioner dapat dilihat pada **Tabel 2**

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa dari seluruh SKPD di Kota

Bukittinggi yang disebarakan kuesioner, hanya 77,5% diantaranya yang mengembalikan dan mengisi kuesioner dengan lengkap. Kuesioner diantar langsung kepada masing-masing responden dan dijemput langsung.

Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian

1. Uji Reliabilitas

Untuk uji reliabilitas instrumen, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,7 bisa diterima, dan lebih dari 0,80 adalah baik (Sekaran, 2006:182). Berikut ini merupakan Tabel nilai cronbach's alpha masing-masing instrumen.

Keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan Cronbach's Alpha yang terdapat pada **Tabel 3** di atas yaitu untuk efektifitas pengendalian anggaran 0,788, pengawasan preventif 0,861, dan pengawasan detektif 0,771. Data ini menunjukkan nilai yang berada pada kisaran di atas 0,70. Dengan demikian semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel.

2. Uji Validitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan Corrected Item-Total Colleration. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data dikatakan valid, dimana r_{tabel} untuk $N = 99$, adalah **0,1663**. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai *Corrected Item-Total Colleration* untuk masing-masing item variabel X_1 , X_2 , dan Y semuanya di atas r_{tabel} . Jika dapat dikatakan bahwa seluruh item pernyataan variabel X_1 , X_2 , dan Y adalah valid.

Tabel 4

Dari Tabel 4 di atas dapat dilihat nilai terkecil dari *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing instrumen. Untuk instrumen Efektifitas Pengendalian Anggaran diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0,244. Pengawasan Preventif diketahui nilai

Corrected Item-Total Correlation terkecil 0,220. Dan untuk Pengawasan Detektif diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0,338.

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan data yang dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis pertanyaan penelitian. Dalam melakukan analisis digunakan teknik regresi berganda. Kegiatan perhitungan statistik menggunakan SPSS versi 15.0. Sebelum data diolah dengan regresi berganda maka uji asumsi klasik dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa data yang diperoleh beserta variabel penelitian layak untuk diolah lebih lanjut.

a. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dari pengolahan SPSS di dapat bahwa nilai untuk masing-masing variabel nilai *probability asymp.sig (2-tailed)* $0,319 > 0,05$. Dengan demikian data dapat dikatakan berdistribusi normal atau dengan melihat grafik *one plot* kurva normal bahwa tingkat penyebaran data menyebar disekitar sumbu diagonal. Berikut ini nilai *probability asymp.sig (2-tailed)* untuk masing-masing variabel bebas dan terikat.

Tabel 5

b. Uji Multikolinearitas

Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* < 10 dan *tolerance* $> 0,1$. Variable pengawasan preventif (X_1) dengan nilai VIF 1,652 dan variabel pengawasan detektif (X_2) adalah nilai VIF yang kecil dari 10, dan nilai *tolerance* $> 0,1$ pada variabel pengawasan preventif (X_1) dengan nilai *tolerance* 0,605 dan variabel pengawasan detektif (X_2) dengan nilai *tolerance* 0,605. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat korelasi variabel-variabel bebas antara satu dengan yang lainnya, atau variabel *independent* pada penelitian ini

bebas multikol. Ini dapat dilihat pada **Tabel 6**.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual atas pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dapat menggunakan uji *Gletser*. Dalam uji ini, di dapat yaitu 0,308 untuk variabel X_1 , dan 0,721 untuk variabel X_2 . Apabila hasilnya $\text{sig} > 0,05$ maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas, model yang baik adalah tidak terjadinya heterokedastisitas. Ini dapat dilihat pada **Tabel 7**

Analisis Data

Nilai *Adjusted R square* menunjukkan 0,476. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel bebas yaitu pengawasan preventif dan pengawasan detektif terhadap variabel terikat yaitu efektifitas pengendalian anggaran adalah sebesar 47,6%, sedangkan 52,4% ditentukan oleh faktor lain. Nilai *adjusted R square* dapat dilihat pada **Tabel 8**

Teknik analisis berganda digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan variabel terikat yang disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada variabel bebas dapat dilihat dari hasil uji regresi berganda seperti pada Tabel 18. Pengaruh secara bersama sama variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan cara membandingkan F_{tabel} dan F_{hitung} . Hipotesis diterima jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ dan nilai $\text{sig} < \alpha$ 0,05. Nilai F_{hitung} adalah 45,482, sedangkan nilai sig adalah 0,000. Dengan demikian berarti nilai $\text{sig} < \alpha$ 0,05, yaitu $\text{sig} 0,000 < \alpha$ 0,05.

Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk menguji pengaruh secara bersama sama variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan

detektif secara bersama-sama berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran. Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 15.0 diperoleh koefisien regresi dalam **Tabel 9**

Dengan bantuan program SPSS versi 15.0, koefisien yang diperoleh dari hasil pengolahan data tentang *pengawasan preventif dan pengawasan detektif* terhadap efektifitas pengendalian anggaran dapat dilihat pada **Tabel 10**

Dari hasil pengolahan data SPSS, dapat dilihat nilai $sig < 0,05$ sehingga model regresi yang dipakai dapat digunakan. Pada Tabel 10 dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$EPA = 4,745 + 0,255 PP + 0,256 PD$$

Keterangan:

EPA : Efektifitas Pengendalian Anggaran

PP : Pengawasan Preventif

PD : Pengawasan Detektif

Dari persamaan diatas dapat dilihat bahwa terdapat nilai konstanta sebesar 4,745 yang berarti bahwa tanpa adanya pengawasan preventif dan pengawasan detektif, tingkat efektifitas pengendalian anggaran pada SKPD-SKPD berada pada 4,745 satuan. Nilai koefisien dari variabel X_1 adalah sebesar 0,255 ini berarti bahwa meningkatnya pengawasan preventif satu satuan, maka akan meningkatkan efektifitas pengendalian anggaran sebesar 0,255 satuan dan bentuk pengaruhnya X_1 terhadap Y adalah positif.

Nilai koefisien X_2 adalah sebesar 0,256 ini berarti bahwa dengan meningkatnya pengawasan detektif pada SKPD satu satuan maka akan meningkatkan efektifitas pengendalian anggaran sebesar 0,256 satuan dan bentuk pengaruh X_2 terhadap Y adalah positif. Koefisien pengawasan preventif dan pengawasan detektif menggambarkan hubungan dengan efektifitas pengendalian anggaran berbanding lurus.

Uji Hipotesis Uji t (t-Test)

Berdasarkan nilai t_{hitung} dan signifikansi yang diperoleh yang dapat dilihat pada Tabel 10, maka uji hipotesis pertama dan kedua dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Hipotesis pertama yang diajukan, bahwa Pengawasan preventif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran. Dari pengolahan data yang diperoleh taraf signifikansi variabel pengawasan preventif sebesar 0,000, nilai ini lebih kecil nilai alpha 5%, dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $5,013 > 1,6564$ yang berarti hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan pengawasan preventif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran pada SKPD di Kota Bukittinggi, sehingga dapat diartikan bahwa adanya pengawasan preventif berpengaruh pada peningkatan efektifitas pengendalian anggaran.
- b. Hipotesis kedua yang diajukan, bahwa pengawasan detektif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran. Dari pengolahan data yang diperoleh taraf signifikansi variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,002, nilai ini lebih kecil nilai alpha 5%, dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $3,163 > 1,6564$ yang berarti hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan pengawasan detektif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran pada SKPD di Kota Bukittinggi, sehingga dapat diartikan bahwa adanya pengawasan detektif berpengaruh pada peningkatan efektifitas pengendalian anggaran.

Pembahasan

1. Pengaruh Pengawasan Preventif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan preventif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran. Bahwa pengawasan preventif dan efektifitas pengendalian anggaran mempunyai hubungan positif, semakin meningkat pelaksanaan pengawasan preventif maka efektifitas pengendalian anggaran juga meningkat.

Hasil ini mengindikasikan bahwa pengawasan preventif dan efektifitas pengendalian anggaran mempunyai hubungan positif, semakin meningkat pelaksanaan pengawasan preventif maka efektifitas pengendalian anggaran juga meningkat. Hasil ini sejalan dengan teori Revrisond (2000:123) yang mengemukakan bahwa pengawasan preventif pada dasarnya dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan.

Berdasarkan data distribusi, dilihat sebaran frekuensi hasil jawaban responden responden yang diteliti, ditemukan responden setuju dengan adanya *review* atas kinerja, prosedur pembinaan dan pengelolaan dana dengan tingkat TCR yang baik. Hal ini terjadi karena adanya peraturan tentang *review* atas kinerja, prosedur pembinaan dan pengelolaan dana akan dapat meminimalisir kemungkinan penyimpangan. Dalam melakukan prosedur pengendalian meliputi fisik atas aset dan catatan serta standar menjadi ukuran atas pelaksanaan anggaran tersebut.

Hal ini terlihat dengan TCR yang baik. Responden juga setuju dengan adanya pemisahan fungsi dan otorisasi atas keterjadian. Ini terjadi karena dengan pemisahan fungsi akan menyulitkan mendukung pengawasan. Responden juga setuju dengan adanya pembatasan akses dan akuntabilitas

terhadap sumber daya dan pencatatannya. Hal ini terlihat dari nilai TCR dengan kategori baik. Selain itu responden juga setuju dengan adanya Prosedur memisahkan tanggung jawab teknologi informasi dari satuan kerja yang menggunakan. Hal ini diperlihatkan pada TCR sebesar 82,2% dengan kategori baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengawasan preventif dijadikan sebagai pengendalian awal terhadap pelaksanaan anggaran. Dengan demikian realisasi anggaran yang dilakukan oleh aparat Pemda Kota Bukittinggi akan lebih terarah dalam pencapaian sasaran anggaran. Selain itu penyimpangan juga akan terminimalisir karena pelaksanaan anggaran telah diatur dengan prosedur pelaksanaan.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan kerja menggunakan prosedur yang merupakan bagian dari pengawasan sebagai salah satu dasar pelaksanaan kegiatan. Hal ini sesuai dengan Porter (1992) dalam Fajri (2009) yang mengatakan tipe pengawasan preventif sangat diperlukan karena dapat menghentikan timbulnya permasalahan.

2. Pengaruh Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan detektif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran. Bahwa pengawasan detektif dan efektifitas pengendalian anggaran mempunyai hubungan positif, semakin terlaksana pengawasan detektif maka efektifitas pengendalian anggaran juga meningkat. Hasil ini mengindikasikan bahwa pengawasan detektif akan meningkatkan efektifitas pengendalian anggaran.

Hasil ini sejalan dengan teori Revrisond (2000:123) mengatakan pengawasan detektif adalah bentuk

pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban, yang biasanya dilaksanakan setelah dilakukan suatu kegiatan. Selanjutnya Revrisond (2000:118) mengatakan bahwa pengawasan sesungguhnya mencakup aspek pengendalian dan pemeriksaan yang dilakukan pihak atasan terhadap bawahan. Jadi, pengawasan detektif merupakan salah satu aspek yang mendukung untuk terlaksananya pengendalian yang efektif.

Berdasarkan data distribusi frekuensi dapat dilihat sebaran frekuensi hasil jawaban responden sebanyak 128 orang responden yang diteliti. Distribusi frekuensi menunjukkan dengan adanya evaluasi berkala, pemeriksaan atas laporan, pengusutan atas penyimpangan dan menilai manfaat atas kegiatan yang dilakukan oleh atasan. Hal ini terlihat dengan nilai TCR yang baik. Evaluasi berkala dan evaluasi atas laporan bendaharawan juga dilakukan oleh atasan langsung bendahara.

Hal ini terlihat dengan nilai TCR yang baik. Sedangkan pada pengawasan oleh kepala biro dan kepala wilayah juga dilakukan dengan melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan laporan tiap unit kerja. Hal ini diperlihatkan pada nilai TCR dengan kategori baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari analisis pengaruh pengawasan preventif dan pengawasan detektif terhadap efektifitas pengendalian anggaran adalah Pengawasan preventif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran pada SKPD di Kota Bukittinggi dan Pengawasan detektif ber-

pengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran pada SKPD di Kota Bukittinggi.

Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini masih terbatas pada meneliti pengaruh pengawasan preventif dan pengawasan detektif terhadap pengendalian anggaran. Masih ada variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini, seperti pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa Aparat pemerintah hendaknya terus meningkatkan pengendalian terhadap anggaran, sehingga kebocoran dapat dihindarkan. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama dan komunikasi antara unit, sehingga tiap hambatan dapat diantipasi pemecahannya. Jadi pegawai bekerja tidak hanya sekedar memenuhi syarat minimum. Aparat pemerintah hendaknya terus meningkatkan kinerja pemerintah pada pengendalian anggaran. Dasarnya : Pada nilai TCR masih ada bagian variabel yang rendah yaitu yang terdapat pada variabel Y item pertnayaan ke 3.

Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang tidak terjadi perubahan dan hasilnya tetap sama, yaitu tidak ada peningkatan. Kejelasan aturan pelaksanaan anggaran harus diperjelas agar mengurangi penyimpangan anggaran dari pelaksanaan anggaran. Pemantauan secara terus menerus oleh atasan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran anggaran, sehingga memberikan dorongan tersendiri terhadap pegawai dalam melaksanakan realisasi anggaran.

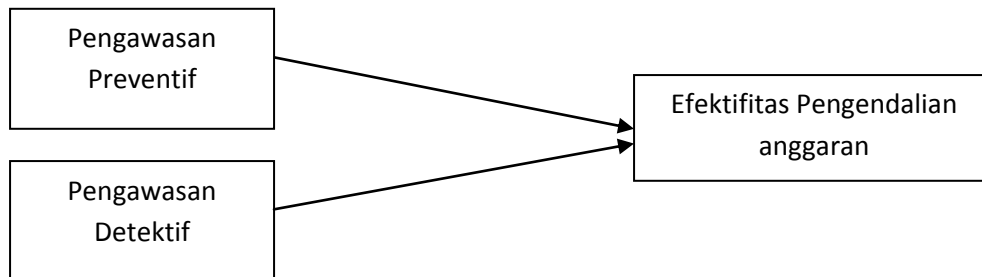
Ketika anggaran sedang dilaksanakan haruslah dilakukan evaluasi oleh pimpinan masing-masing unit kerja supaya dapat mengetahui sejauh mana tingkat penggunaan dana yang telah dilaksanakan. Rencana kerja hendaklah sesuai dengan kemampuan aparat dan anggaran yang tersedia oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens & Loebbecke. (2008). *Auditing Pendekatan Terpadu*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bambang Yudoyono. (2003). *Otonomi Daerah, Desentralisasi, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah Dan Anggota DPRD*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hindri Asmoko (2006). "Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian". Melalui (<http://www.bppk.depkeu.go.id>).[1 Desember 2008].
- Husein Umar. (2008). *Desain Penelitian Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indra Bastian. (2001). *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- _____ . (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: BPFE.
- Jones, R., & M. Pendlebury. (2000). *Public Sector Accounting*. 5th Edition. London: Pitman Publishing
- Ketetapan MPR RI Nomor II Tahun 1988 tentang GBHN
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152 tahun 2011 Tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian Keuangan
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Negara.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Munandar. (2001). *Budgeting*. Yogyakarta: BPFE.
- Porter, Thomas, (1992). *EDP Pengendalian dan Auditing*. Jakarta : Erlangga.
- (2008). "Pengawasan Anggaran 2009 Diperketat." *Padang Ekspres*. (3 September 2008). Melalui (<http://www.padangekspres.co.id>).[1 Desember 2008]
- (2011)."Laporan Realisasi Anggaran 2011"Kota Bukittinggi
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Revrisond Baswir. (1999). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.

- Saponah. (2003). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. *SNA VI*.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian. Edisi Revisi V*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Sugiyono. (1999). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Syakhroza, A. (2002). "The Effect of Politics on Budgetary Control: A Study of Fertilizer Industry in Indonesia." *International Journal of Business Studies*. Vol 10. Hlm. 75-96.
- T. Hani Handoko. (1995). *Manajemen Personalia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Widjaja. (2004). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja Gunawan. (2002). *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zulkifli, Amsyah. (2003). *Manajemen Sistem Informasi*. Jakarta: Gramendia Pustaka Utama.

Gambar 1



Tabel 2

Kisi-kisi Instrumen Penelitian

No.	Variabel	Indikator	Item	Acuan
1.	Pengawasan Preventif	1. Review atas kinerja 2. Pembinaan sumber daya manusia 3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi 4. Pengendalian fisik atas asset 5. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja 6. Pemisahan fungsi 7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting 8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian 9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya 10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya 11. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern, transaksi dan kejadian penting	1 2 3 4 5 6 7 8 9-10 11-12 13-14	Kemenkeu no 152 tahun 2011
2.	Pengawasan detektif	1. Rekonsiliasi (<i>reconciliation</i>) 2. Verifikasi (<i>verivication</i>) 3. Review atas kinerja operasi (<i>review of operating performance</i>)	1-4 5-6 7-9	Kemenkeu no 152 tahun 2011
3.	Efektifitas pengendalian anggaran	1. Realisasi anggaran 2. Kesesuaian dengan peraturan 3. Hasil berdaya guna 4. Mengatasi hambatan dan penyimpangan	1 2-3 4-6 7	Pengelolaan Harta Kekayaan Negara (Widjaja, 2002)

Tabel 3 Nilai *Cronbach's Alpha* dan *Corrected Item-Total Correlation*

Instrumen Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> Terkecil
Efektifitas Pengendalian Anggaran (Y)	0,798	0,334
Pengawasan Preventif (X ₁)	0,875	0,330
Pengawasan Detektif (X ₂)	0,793	0,314

Tabel 4 Nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil

Instrumen Variabel	Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> Terkecil
Efektifitas Pengendalian Anggaran (Y)	0,244
Pengawasan Preventif (X ₁)	0,220
Pengawasan Detektif (X ₂)	0,338

Tabel 5 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.78946882
Most Extreme Differences	Absolute	.096
	Positive	.096
	Negative	-.073
Kolmogorov-Smirnov Z		.957
Asymp. Sig. (2-tailed)		.319

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Tabel 6

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.605	1.652
	X2	.605	1.652

a. Dependent Variable: Y

Tabel 7

Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.421	1.411		.298	.766
	X1	.028	.027	.134	1.024	.308
	X2	-.015	.043	-.047	-.359	.721

a. Dependent Variable: AbsUt

Tabel 8

Adjusted R Square

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.698 ^a	.487	.476	1.808	1.827

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Tabel 9

Uji F Hitung

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	297.356	2	148.678	45.482	.000 ^a
	Residual	313.815	96	3.269		
	Total	611.172	98			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Tabel 10

Koefisien Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.745	2.643		1.795	.076
	X1	.255	.051	.471	5.013	.000
	X2	.256	.081	.297	3.163	.002

a. Dependent Variable: Y